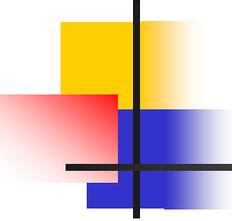


“Peran Bank Pertanian dalam Pembiayaan Sektor Pertanian”

**Oleh: Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim Sp.I
Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian**

**Disampaikan pada Seminar Nasional
“Menuju Pendirian Bank Pertanian”
IPB International Convention Center, Bogor, 11 Mei 2009**

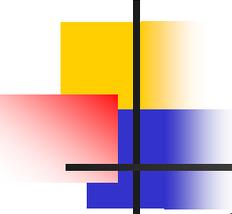


1. Pendahuluan

- Indonesia adalah negara agraris dan maritim, 40 juta angkatan kerja Pertanian umumnya belum memiliki akses ke perbankan
- Pemerintah, c.q. Departemen Pertanian telah sejak lama menyadari pentingnya dan berupaya mewujudkan sebuah bank yang khusus melayani sektor pertanian;
- Inisiatif tersebut terkendala berbagai hal terutama masalah peraturan perbankan dan *political will* pemerintah dan DPR;
- Belajar dari kegagalan-kegagalan tersebut, saatnya sekarang para stakeholder yang terlibat untuk menyatukan persepsi dan bekerjasama untuk mewujudkan berdirinya Bank Pertanian.

2. Pengalaman Departemen Pertanian dan Skim di bidang Pertanian yang ada

- a. **Fasilitasi Pembiayaan Pertanian**
- Merupakan salah satu landasan fundamental dalam Program Pembangunan Pertanian (Panca Yasa);
 - Fasilitasi pembiayaan antara lain:
 - Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP;
 - program subsidi bunga (KKP-E, KPEN-RP, dan PKBL);
 - Program penjaminan (keringanan agunan): Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM;
 - Skim kredit komersial bagi petani yang sudah *feasible* dan *bankable*.

- 
-
- Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) yang dilaksanakan dari tahun 2006 merupakan skim pembiayaan dengan mekanisme penjaminan pemerintah terhadap kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh bank pelaksana untuk pengembangan sektor pertanian. Sampai dengan tahun 2008 telah tersalur sebesar Rp. 539,04 miliar dengan jumlah nasabah 7.950 petani/kelompok tani.
 - Bantuan Langsung Masyarakat Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) yang dilaksanakan pada tahun 2007. Dana yang tersalur sebesar Rp. 275 milyar, jumlah penerima 39 ribu orang.

2. Pembiayaan Pertanian di Indonesia (lanjutan)

Tabel: Kebutuhan Pembiayaan Tahun 2008

Komoditas	Luas Areal (Ha)	Biaya per Ha/ Unit Usaha (Rp)	Kebutuhan Investasi (Rp)
a. Padi/Beras	12 juta Ha	6,5 juta	78,0 trilyun
b. Jagung	3,6 juta Ha	5,8 juta	20,8 trilyun
c. Kedele	450 ribu Ha	4,7 juta	2,1 trilyun
d. Ubi Kayu	400 ribu Ha	4,6 juta	1,8 trilyun
e. Tebu/Gula	250 ribu Ha	18,0 juta	4,5 trilyun
f. Sawit *)	200 ribu/th	39,7 juta	238,2 trilyun
g. Karet *)	200 ribu/th	37,3 juta	111,9 trilyun
h. Kakao *)	200 ribu/th	43,5 juta	39,1 trilyun
T o t a l	-	-	514,4 trilyun

*) tidak termasuk pemeliharaan

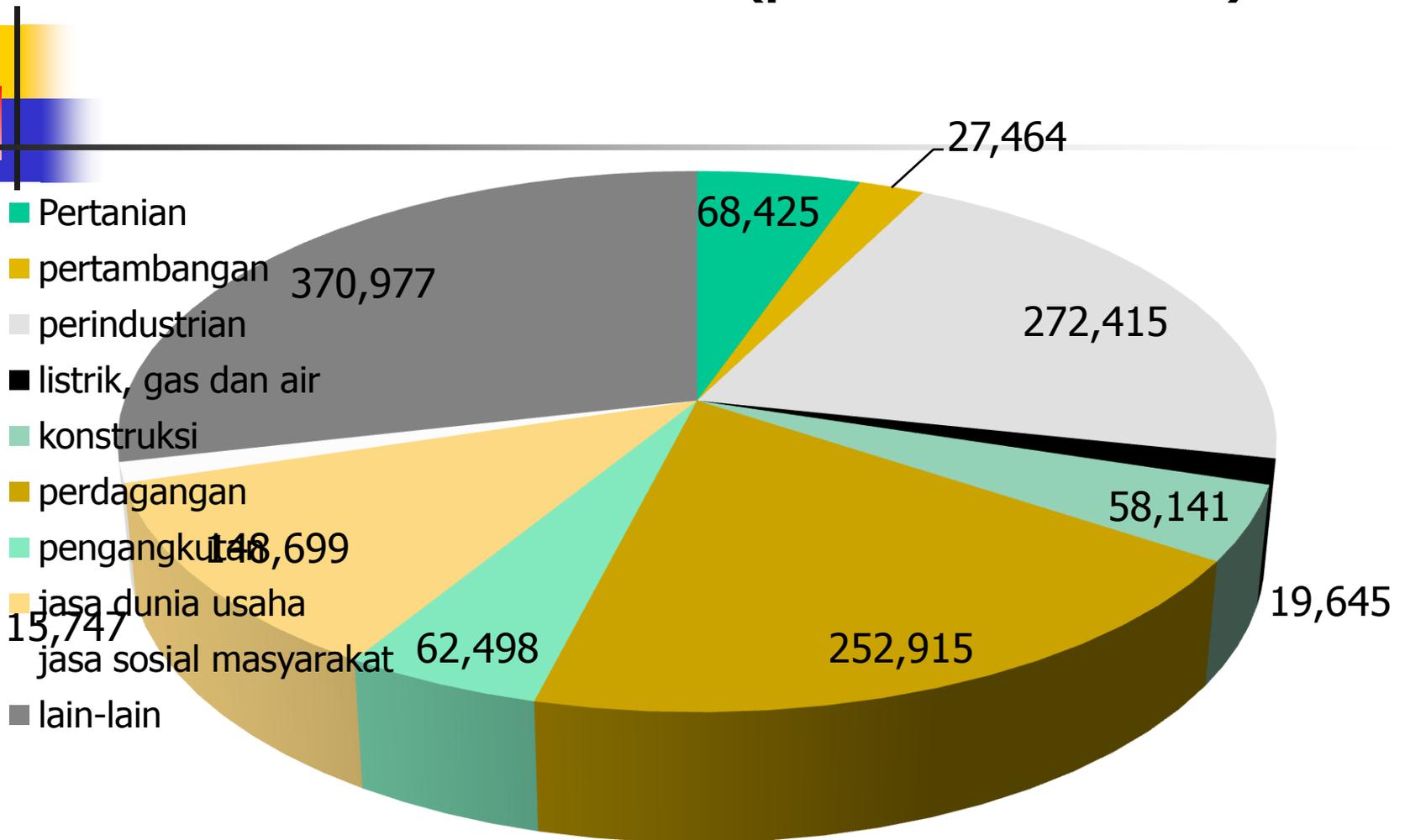
6 juta ha sawit, 3 juta ha karet dan 0,9 juta ha kakao

Tabel 1 . Portofolio Kredit Nasional (posisi Februari 2009)

Sektor Ekonomi	Outstanding (Rp. Trilyun)	Prosentase
1. Pertanian	68,425	5,28
2. Pertambangan	27,464	2,12
3. Perindustrian	272,415	21,00
4. Listrik, gas, dan air	19,645	1,51
5. Konstruksi	58,141	4,48
6. Perdagangan	252,915	19,50
7. Pengangkutan	62,498	4,82
8. Jasa dunia usaha	148,699	11,47
9. Jasa sosial masyarakat	15,747	1,21
10. Lain-lain	370,977	28,60
Total	1.296,926	100

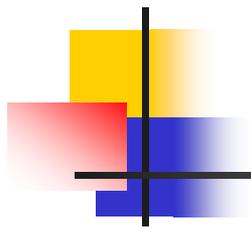
Sumber : Bank Indonesia

Portofolio Kredit Nasional (posisi Februari 2009)

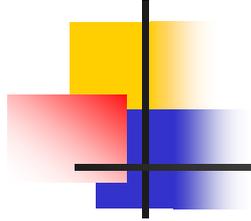


Sumber : Bank Indonesia

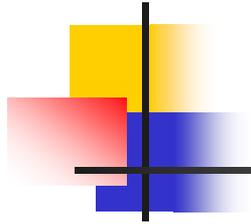
2. Pembiayaan Pertanian di Indonesia (lanjutan)

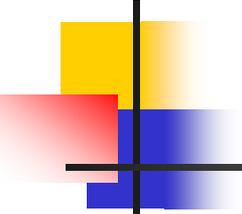


3. Kaidah dalam penyusunan Skim Pembiayaan



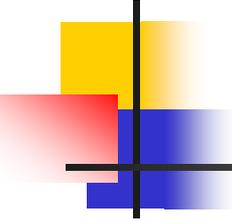
3. Kaidah dalam penyusunan Skim Pembiayaan





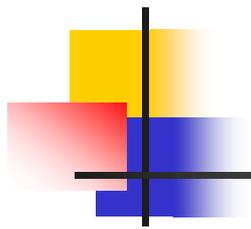
PILIHAN SOLUSI :

1. Mengembangkan jaringan kelembagaan petani di perdesaan melalui Gapoktan (embrio LKM)
2. Kerjasama Bank dengan Penyuluh Pertanian (Fasilitator Pembiayaan Petani), LKM, Bank Daerah, Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD)
3. Pengembangan Kerjasama Kemitraan : melalui pola *risk sharing* dan *avalis*.
4. Perlunya perubahan image dari *hig risk* menjadi *opportunity*
5. *Political will* pemerintah dan DPR ➡ Bank Pertanian



6. Penutup

- **Pendirian Bank Pertanian merupakan sebuah *milestone* bagi masyarakat pertanian dalam rangka mewujudkan pertanian modern, berdaya saing kuat dan berkelanjutan serta menjamin kesejahteraan petani;**
- **Pendirian Bank Pertanian memerlukan *political will* dari pemerintah dan DPR serta kesiapan kelembagaan petani/peternak yang kokoh di perdesaan.**



Terima Kasih,

Wassalaamualaikum wr. wbr.